**POLA KOMUNIKASI NOTARIS DALAM MEDIASI**

**SENGKETA HUKUM PERDATA**

**Tesis**

****

**Oleh:**

**Wawan Irawan**

**NPM: 228080020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI**

**PASCA SARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2024**

**ABSTRAK**

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan tugas lainnya, tetapi juga terbatas dalam memberikan penyuluhan hukum serta dilarang melakukan tindakan di luar wewenangnya. Profesi mediator harus sesuai dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan yang tidak mengganggu kehormatan dan martabat jabatan notaris, sehingga tidak melanggar larangan yang berlaku bagi notaris.

Tujuan penelitian adalah untuk memahami pola komunikasi notaris dalam mediasi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan Komunikasi Persuasif Carl Hovland. Hasilnya menunjukkan bahwa Notaris menggunakan komunikasi persuasif dan efektif untuk memfasilitasi mediasi yang produktif, sementara akta otentik yang dibuatnya berfungsi sebagai bukti sah perjanjian. Meskipun demikian, kekurangan penyuluhan hukum dapat berdampak negatif, dan perlindungan hukum yang lebih kuat diperlukan untuk menjaga integritas dan independensi Notaris. Dinamika mediasi juga memengaruhi persepsi klien, yang berkembang dari harapan awal hingga skeptisitas, namun hasil mediasi yang positif dapat memperkuat kepercayaan pada Notaris. kesimpulan pentingnya peningkatan profesionalisme, penegakan hukum yang kuat, dan perlindungan yang jelas untuk mendukung peran Notaris dalam menyelesaikan sengketa hukum perdata dengan integritas dan keadilan.

**Kata Kunci :** Notaris, Mediator, Komunikasi Persuasif, Carl Hovland.

***ABSTRACT***

*Notaries have the authority to make authentic deeds and other tasks, but are also limited in providing legal advice and are prohibited from taking actions outside their authority. The mediator's profession must be in accordance with religious norms, decency and propriety that do not interfere with the honor and dignity of the notary's office, so that it does not violate the prohibitions that apply to notaries.*

*The aim of the research is to understand notary communication patterns in mediation. Using qualitative research methods and Carl Hovland's Persuasive Communication approach. The results show that the Notary uses persuasive and effective communication to facilitate productive mediation, while the authentic deed he makes serves as legal proof of the agreement. However, a lack of legal education can have a negative impact, and stronger legal protection is needed to maintain the integrity and independence of Notaries. Mediation dynamics also influence client perceptions, which evolve from initial hope to skepticism, but positive mediation outcomes can strengthen trust in the Notary. conclusion of the importance of increasing professionalism, strong law enforcement, and clear protection to support the role of Notaries in resolving civil legal disputes with integrity and justice.*

***Keywords:*** *Notary, Mediator, Persuasive Communication, Carl Hovland.*

**RINGKESAN**

Notaris boga wewenang pikeun nyieun akta otentik jeung pancén séjén, tapi ogé diwatesan dina méré nasehat hukum jeung dilarang ngalakukeun tindakan di luar wewenang maranéhanana. Profesi mediator kudu luyu jeung norma-norma agama, kasopanan jeung kaparigelan anu teu ngaganggu kahormatan jeung martabat jabatan notaris, sangkan henteu ngalanggar larangan-larangan anu dilarapkeun ka notaris.

Tujuan tina panalungtikan nyaéta pikeun mikanyaho pola komunikasi notaris dina mediasi. Ngagunakeun métode panalungtikan kualitatif jeung pendekatan Komunikasi persuasif Carl Hovland. Hasilna nunjukkeun yén Notaris ngagunakeun komunikasi persuasif sareng efektif pikeun ngagampangkeun mediasi anu produktif, sedengkeun akta otentik anu didamelna janten bukti sah tina perjanjian. Tapi, kurangna atikan hukum bisa boga dampak negatif, sarta panyalindungan hukum kuat diperlukeun pikeun ngajaga integritas jeung kamerdikaan Notaris. Dinamika mediasi ogé mangaruhan persepsi klien, nu mekar ti harepan awal kana skepticism, tapi hasil mediasi positif bisa nguatkeun kapercayaan di Notaris. kacindekan tina pentingna ngaronjatkeun profesionalisme, penegak hukum kuat, sarta panyalindungan jelas pikeun ngarojong peran Notaris dina resolving sengketa hukum sipil kalawan integritas jeung kaadilan.

Kata Kunci: Notaris, Mediator, Komunikasi Persuasif, Carl Hovland.

1. **PENDAHULUAN**

Kebijakan adalah seperangkat prinsip dan konsep yang memandu kerja, kepemimpinan, dan tindakan di berbagai sektor, termasuk pemerintah, organisasi, dan individu. Hal ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 Juncto UU No. 2 Tahun 2014 tentang Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum. Kebijakan harus mematuhi hierarki hukum untuk menghindari konflik hukum dan peraturan. Mereka juga dapat diartikan sebagai mekanisme politik, manajemen, keuangan, atau administratif untuk mencapai tujuan tertentu. Pola komunikasi adalah gambaran, struktur, atau bentuk proses komunikasi antara dua orang atau lebih, berdasarkan teori komunikasi. Mereka memfasilitasi pemikiran sistematis dan logis dengan memungkinkan munculnya umpan balik atau timbal balik dari proses komunikasi. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Mereka memperoleh kewenangan dari negara melalui UUJN untuk melaksanakan sebagian tugas negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang perdata.

Akta autentik adalah suatu produk hukum yang diterbitkan oleh Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, meliputi alat bukti luar, formil, dan materil. Pembukaan dan penutupan akta mencerminkan keadaan sebenarnya pada saat akta dibuat. Kedudukan Notaris diperlukan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya dalam membuat akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dikehendaki para pihak. Pengertian jabatan itu tetap berlaku sepanjang jabatan itu melekat pada seseorang, dan apabila seseorang pensiun atau berhenti menjadi Notaris, maka jabatannya sebagai Notaris pun lenyap. Notaris memegang peranan penting dalam bidang perdata, khususnya dalam pembuatan akta autentik. Kewenangan mereka diberikan melalui UUJN dan kode etiknya yang menekankan persamaan kedudukan warga negara di depan hukum. Garis Besar Haluan Negara Tahun 1983 juga menekankan pada peningkatan pendidikan hukum untuk menjunjung tinggi kewajiban warga negara dalam menegakkan hukum, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.

Notaris mempunyai tanggung jawab dalam bidang penyuluhan hukum, antara lain tanggung jawab etika, profesional, dan hukum. Tanggung jawab etis menyangkut penilaian benar atau salahnya perbuatannya, sedangkan tanggung jawab profesional menitikberatkan pada peningkatan wawasan dan pengetahuan Notaris dalam membuat akta autentik. Tanggung jawab hukum meliputi tanggung jawab atas keaslian akta apabila ada permasalahan dikemudian hari. Tanggung jawab perdata dan pidana bagi Notaris meliputi pemenuhan Pasal 1243 KUH Perdata atau melanggar undang-undang, dan pertanggungjawaban pidana apabila melakukan perbuatan hukum yang dilarang atau melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Pendidikan hukum yang diberikan oleh Notaris penting bagi para pihak yang membuat akta autentik, karena dapat memahami ketentuan hukum dan meminimalisir terjadinya perselisihan. Namun apabila terjadi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum karena kelalaian Notaris, maka hal ini dapat menimbulkan akibat hukum dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Notaris mempunyai keterbatasan dalam memberikan penyuluhan hukum dan tidak boleh melakukan tindakan diluar kewenangannya. Klien seringkali lebih banyak berinteraksi dengan staf Notaris pada saat proses pembuatan akta, karena mereka memberikan pengarahan mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan dan tidak bertemu dengan Notaris saat membacakan dan menandatangani akta. Dalam prakteknya, Notaris juga berperan sebagai mediator dalam sengketa akta, namun tidak boleh bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan, yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

1. **FOKUS PENELITIAN**

Berdasarkan konteks di atas, peneliti memfokuskan masalah tersebut agar sesuai dengan inti dari tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan penelitian Bagaimana Pola Komunikasi Notaris Dalam Mediasi Sengketa Hukum Perdata.

1. **TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian adalah memperoleh informasi dan deksripsi mengenai Pola Komunikasi Notaris Dalam Mediasi Sengketa Hukum Perdata secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah :

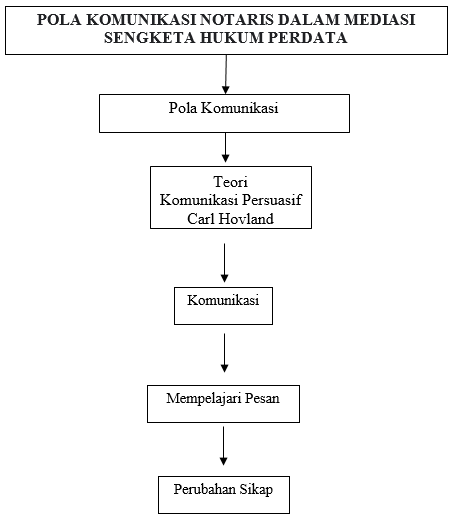
1. Mengetahui dan menjelaskan pola komunikasi notaris dalam mediasi sengketa hukum perdata
2. Mengetahui dan menjelaskan pola komunikasi notaris bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi sengketa hokum perdata
3. Mengetahui dan menganalisis faktor hambatan dan solusi melaksanakan proses mediasi
4. **TINJAUAN PUSTAKA**

Pembenaran untuk membicarakan isu yang sedang dibahas berasal dari evaluasi literatur. Informasi yang akan diberikan untuk membantu Pola Komunikasi Notaris dalam Kesulitan Mediasi Sengketa Hukum Perdata. Adanya tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa penelitian merupakan suatu pendekatan metodis untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam ilmu pengetahuan.

1. **KERANGKA PEMIKIRAN**

Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir untuk menjelaskan pola komunikasi yang digunakan notaris dalam memediasi sengketa hukum perdata dan peranan akta otentik sebagai bukti kesepakatan para pihak. Dikaji juga mengenai akibat hukum dari jasa notaris dan peranan notaris sebagai mediator. Penelitian ini juga mengungkap penyimpangan kebijakan hukum terkait notaris sebagai saksi dan pemeriksa alat bukti otentik akta. Selain itu juga menganalisis perlindungan hukum bagi profesi Notaris dan hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam memperolehnya, khususnya kriminalisasi terhadap tugas pembuatan akta autentik dan dampaknya terhadap pribadi Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran dan kedudukan Notaris dalam proses mediasi sengketa.

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**



*Sumber: Modifikasi Penulis 2024*

1. **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan subyektif, dan wawancara mendalam untuk menggali berbagai aspek sengketa hukum perdata. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Notaris dan referensi terkait, termasuk artikel dan berita media massa. Data dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi, display, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan di Kota Bandung, tepatnya di beberapa kantor Notaris. Peneliti menggunakan teknik yang ditentukan sejak awal, antara lain pengumpulan data primer melalui survei dan wawancara mendalam, serta data sekunder berupa studi literatur, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian ilmiah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu mengelompokkan dan memilih data hasil penelitian lapangan berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Data-data tersebut kemudian disusun dan dikaji secara sistematis dengan metode deduktif dengan fokus pada konsep, asas, norma, dan sistem hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi di Indonesia. Proses siklus diikuti untuk memastikan data yang dikumpulkan saling berhubungan secara sistematis. Keabsahan data diuji dengan menggunakan beberapa uji, khususnya pada penelitian kualitatif, antara lain uji validitas internal yang mengacu pada tingkat ketepatan desain penelitian. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai sengketa hukum perdata dan implikasinya..

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Penerapan Mediasi di Pengadilan Negeri**

Penelitian mengenai efektivitas mediasi di pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa perdata telah dilakukan sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) pada tahun 2003, 2008, dan 2016. PERMA bertujuan untuk mengintegrasikan mediasi ke dalam proses peradilan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan damai. adil bagi semua pihak. Namun teknis pelaksanaannya memunculkan permasalahan penting yang memerlukan kajian objektif, seperti kewajiban formal para pihak, kemampuan mediator, pembiayaan panggilan mediasi, standarisasi keberhasilan mediasi, klasifikasi jenis kasus yang dimediasi, pelaporan, dan evaluasi. Masih terdapat beberapa permasalahan baik secara faktual maupun normatif yang menghambat pelaksanaan kewajiban melakukan mediasi sebagaimana diamanatkan Perma. Penelitian ini memaparkan beberapa permasalahan tersebut setelah melakukan penelitian evaluatif secara langsung di beberapa Pengadilan Negeri mengenai pemahaman dan penerapan praktis ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016.

1. **Kewajiban Para Pihak Untuk Menghadiri Proses Mediasi Dengan/Tanpa Kuasa Hukum**

Penerapan mediasi di Pengadilan melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 menimbulkan berbagai penafsiran dan implikasi praktis. Ada dua pemikiran berbeda yang muncul: proses mediasi harus diselesaikan pada tahap penyelesaian setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, atau pada saat kedua belah pihak hadir di persidangan. Ketentuan mengenai mediasi memuat pasal-pasal yang dapat ditafsirkan, seperti Pasal 2 yang menyatakan bahwa tidak dilaksanakannya prosedur mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 RGB, sehingga mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. Meditasi di pengadilan dipahami sebagai bentuk intensifikasi upaya perdamaian yang selama ini dilaksanakan secara formal. Merupakan upaya perdamaian yang intensitas pelaksanaannya dilakukan secara lebih komprehensif dan serius dengan bantuan mediator. Upaya perdamaian langsung yang dilakukan langsung oleh majelis hakim sebelum persidangan kurang efektif dan terkesan formalistik belaka karena suasana persidangan seringkali menimbulkan ketegangan emosional dan psikologis bagi masing-masing pihak yang bersengketa, sehingga sulit menemukan titik temu penyelesaian sengketa secara damai. perselisihan.

Pelaksanaan mediasi harus disesuaikan dengan ketentuan perdamaian yang disyaratkan dalam Pasal 130 HIR./154 R.Bg. Penerapannya adalah prosedur mediasi tetap dilakukan meski salah satu pihak tidak hadir. Tujuan utama mediasi adalah menghentikan perselisihan yang sedang berlangsung oleh pihak-pihak yang merasa berkepentingan dan kemudian menyelesaikannya secara kekeluargaan. Apabila yang hadir hanyalah penggugat, setelah melalui tahap mediasi yang dipimpin oleh mediator ternyata penggugat bersedia menyelesaikan perselisihannya secara damai atau melepaskan haknya agar penggugat menarik perkaranya, dalam kondisi ini penggugat menarik perkaranya. mediasi dianggap berhasil. Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa kehadiran langsung kedua belah pihak di pengadilan bukanlah syarat utama wajibnya mediasi, karena yang dimediasi adalah pihak-pihak yang berperkara yang telah resmi tercantum dalam gugatan. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjalani proses mediasi.

1. **Itikad Baik Para Pihak dalam Proses Mediasi**

Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengatur ketentuan mengenai itikad baik para pihak dalam proses mediasi. Di dalamnya diuraikan beberapa faktor yang dapat mengakibatkan suatu pihak atau kuasa hukumnya dinyatakan tidak beritikad baik, seperti ketidakhadiran, kehadiran pada rapat pertama namun tidak pernah hadir pada rapat berikutnya, ketidakhadiran berulang kali sehingga mengganggu jadwal, tidak menyampaikan atau menanggapi usulan pihak lain. melanjutkan perkara, dan tidak menandatangani konsep perjanjian damai yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. Akibat hukum jika salah satu pihak beritikad buruk dalam proses mediasi adalah dikenakannya kewajiban membayar biaya mediasi. Apabila pihak yang beritikad buruk adalah penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan penetapan kewajiban membayar biaya mediasi tidak dapat diambil sebagai upaya hukum lanjutan.

Ketentuan ini merupakan bagian dari kebijakan Mahkamah Agung untuk melaksanakan mediasi di pengadilan dengan memaksa para pihak untuk hadir di pengadilan pada tahap awal proses mediasi. Namun ketentuan tersebut masih terkendala beberapa kendala, antara lain dalam pelaksanaan sanksi pembayaran ganti rugi yang dikenakan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam proses mediasi. Selain itu, tahap mediasi juga bukan merupakan bagian dari prosedur hukum acara yang berlaku di pengadilan, dan bukan merupakan bagian dari syarat formal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam suatu sengketa perdata.

1. **Jangka Waktu Penyelesaian Mediasi**

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi saat ini hanya memiliki jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya penetapan perintah melakukan mediasi. Namun demikian, apabila kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang proses mediasi, Perma Nomor 1 Tahun 2016 memberikan jangka waktu perpanjangan proses mediasi yang lebih banyak dibandingkan jangka waktu perpanjangan proses mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. Saat ini jangka waktu perpanjangan mediasi dapat diberikan hingga 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu proses mediasi.

Ketentuan tersebut diatas sebagai suatu solusi bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi di Pengadilan dalam hal pemberian waktu yang fleksibel, sebagai mana ketentuan sebelumnya bhwa jangka waktu pelaksanaan mediasi sekitar 40 hari, namun ada anggapan bahwa waktu tersebut sangat lama dan menambah panjang waktu proses penyelesaian perkara, maka jangka waktu tersebut dikurangi menjadi 30 hari, namun tetap masih memberikan kelonggaran waktu bagi para pihak jika para pihak berkepentingan untuk menyelesaiakan sengketa melalui mediasi dengan adanya penambahan perpanjangan waktu 30 hari kemudian.

1. **Pengaturan Baru Mengenai Kesepakatan Sebagian**

Perma Nomor 1 Tahun 2016 memperkenalkan aturan baru mengenai perjanjian sebagian, yaitu perjanjian antara banyak pihak, termasuk penggugat dan tergugat, pada tahap mediasi. Apabila tercapai kesepakatan maka penggugat dapat mengajukan gugatan tersendiri terhadap tergugat yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian. Sebab, jika gugatan dilanjutkan maka posita dan petitum gugatan akan berubah, dan tergugat tidak akan mencapai kesepakatan secara musyawarah. Untuk mengubah gugatan, penggugat harus mengikuti Pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa perubahan gugatan hanya dapat dilakukan tanpa mengubah atau menambah pokok gugatan, dan perubahan gugatan juga memerlukan persetujuan tergugat. Sedangkan bagi tergugat yang telah mencapai kesepakatan damai dengan penggugat, maka perkara dilanjutkan dengan membuat perjanjian damai yang dapat diperkuat dengan Akta Damai.

Maksud perjanjian sebagian adalah untuk menghilangkan para pihak, objek perkara, dan tuntutan hukum dalam suatu perkara sebelum masuk pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Penulis berharap dengan diterapkannya Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini, prosedur mediasi di pengadilan akan menjadi lebih optimal dan meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi, khususnya di pengadilan pilot project. Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri, yang akan diperiksa hanyalah obyek perkara atau tuntutan hukum yang tidak mencapai kesepakatan pada tahap mediasi. Pendekatan mediasi baru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keberhasilan proses mediasi, khususnya di pengadilan yang merupakan proyek percontohan.

**Peran Penting Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan**

Hakim memegang peranan penting dalam mencapai cita-cita hukum, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Namun mediasi yang dilakukan oleh hakim sering kali gagal sehingga menyebabkan perkara di Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri menumpuk. Hanya sedikit kasus yang berhasil diputus melalui mediasi di pengadilan umum dan pengadilan agama. Kegagalan ini terkait dengan aktor kunci yang menangani mediasi, yaitu hakim. Pemahaman dan kesiapan hakim mengenai kebijakan pelaksanaan mediasi di pengadilan sangatlah penting. Ada hakim yang pragmatis dan menganggap mediasi hanya sekedar formalitas belaka, ada pula yang memandangnya sebagai formalitas belaka. Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan perlu disosialisasikan dan dilaksanakan secara serius. Hakim sulit menerapkan Perma tentang mediasi di pengadilan karena faktor internal, seperti hakim menganggap mediasi sebagai salah satu tugas wajibnya, dan faktor eksternal seperti kurangnya pemahaman para pihak tentang mediasi dan budaya individualistis masyarakat. Faktor-faktor tersebut turut menyebabkan gagalnya upaya mencapai perdamaian melalui musyawarah atau mediasi di pengadilan.

Pragmatisme hakim dalam menyikapi lembaga mediasi berakar dari anggapan mereka bahwa mediasi hanyalah bagian dari upacara dan rutinitas persidangan. Pragmatisme ini dikaitkan dengan kepentingan ekonomi pribadi serta efisiensi dan efektivitas proses peradilan. Hakim lebih fokus dalam menyelesaikan perkara, seringkali bertentangan dengan waktu atau jadwal sidang yang ditentukan oleh ketua pengadilan. Kendala utama bagi hakim mediator adalah pembagian waktu antara menyelesaikan, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, sehingga membatasi kepentingan mereka dalam melakukan mediasi. Dalam beberapa kasus, potensi penyelesaian damai melalui mediasi tidak optimal sehingga kasus tersebut dilanjutkan ke persidangan biasa. Pemahaman masyarakat terhadap mediasi masih minim, dan budaya masyarakat (para pihak) terasa lebih nyaman jika dikaji secara normal. Hakim merasa beban penanganan perkara bertambah dengan adanya kewajiban melakukan mediasi dalam perkara perdata.

Budaya pragmatisme telah mempengaruhi pola pikir hakim sehingga pelaksanaan mediasi menjadi tidak efektif. Selain itu, mediator dari kalangan hakim juga tidak memiliki keahlian khusus mengenai mediasi, hal ini merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam mengukur tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan. Faktor eksternal seperti para pihak dan pengacara juga mempengaruhi ketidakmampuan hakim dalam menyelesaikan sengketa pada tahap mediasi di pengadilan. Para pihak yang bersengketa enggan menyelesaikan permasalahan melalui mediasi karena proses pengadilan dianggap bersifat “bertele-tele”. Pengacara juga berkontribusi dalam menggagalkan perdamaian melalui mediasi, karena hal tersebut memotong aliran litigasi dan mengurangi pendapatan mereka.

**Beberapa Permasalahan Terkait Proses Intergarasi Mediasi Di Pengadilan**

Mediasi yang dianeksasi oleh pengadilan mempunyai kelemahan, termasuk fokusnya pada efisiensi kelembagaan dan mengurangi tumpukan kasus, dibandingkan kepuasan pihak dan penyelesaian masalah secara kreatif. Keberhasilan mediasi pengadilan diukur dari jumlah mediasi yang dilaksanakan dan banyaknya perkara yang menghasilkan penyelesaian melalui mediasi, sehingga dapat mengurangi atribut mediasi yang menekankan pada kebutuhan dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Shaw (1989) berpendapat bahwa mediasi dalam program yang disponsori atau dianeksasi oleh pengadilan telah menjadi seperti evaluasi kasus atau penasihat penyelesaian, yang berfokus pada mengidentifikasi dan mengeksplorasi kepentingan, kebutuhan, dan keterbatasan kedua belah pihak.

Astor (2001) mengidentifikasi potensi bahaya distorsi mediasi karena kedekatannya dengan pengadilan, karena pengadilan mungkin memiliki pengaruh terhadap litigasi dan para pihak mungkin merasa dibatasi oleh kerangka hukum dan peraturan prosedural. Sebuah penelitian di Florida menyoroti pentingnya menjaga nilai mediasi dalam mediasi yang dianeksasi oleh pengadilan, dan menemukan bahwa asimilasi otoritas dan formalitas pengadilan terhadap program mediasi menyebabkan asimilasi otoritas dan formalitas terhadap program mediasi. Ada dua jenis rujukan yang umumnya dilakukan dalam mediasi yang dilakukan oleh pengadilan: rujukan ke panitera atau mediator internal yang dipekerjakan oleh pengadilan dan rujukan ke mediator eksternal, biasanya praktisi hukum swasta atau beberapa mediator yang terdaftar di bawah pusat mediasi.

**Hasil mediasi di Pengadilan Z**

Hasil mediasi adalah hasil proses mediasi di Pengadilan Z yang dapat menghasilkan kesepakatan damai atau gagal mencapai kesepakatan. Apabila suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka akan diperiksa oleh hakim secara litigasi. Rendahnya jumlah perselisihan yang dapat mencapai kesepakatan merupakan suatu hal yang memprihatinkan karena dapat menambah beban perkara di Mahkamah Agung dan tumpukan perkara di Mahkamah Agung. Proses mediasi mempunyai batas waktu 40 hari kerja dan dapat diperpanjang 14 hari. Jika suatu perselisihan dapat diselesaikan melalui mediasi, hal ini dapat meminimalkan beban perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri dan membantu mewujudkan prinsip Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara secara sederhana, cepat, dan biaya murah. Dalam beberapa kasus, para pihak tidak dapat menghadiri pertemuan mediasi yang dijadwalkan karena alasan yang sah atau alasan ketidakhadiran mereka yang tidak sah. Mediator berwenang menyatakan mediasi gagal atau menyatakan verstek, yaitu perjanjian yang dibuat tanpa kehadiran tergugat. Pemahaman masyarakat terhadap mediasi masih terbatas karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Pemerintah perlu menyebarkan informasi tentang mediasi untuk memastikan penegakannya.

Pada tahun 2022, mediasi menghasilkan kesepakatan damai terkait sengketa penipuan dengan dugaan pasal 372 dan 378 KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Z. Investor asal Z, Jawa Barat, menjadi korban penipuan yang dilakukan RTP yang menggunakan CV palsu. Bisnis antara Naufal dan RTP pada awalnya berjalan lancar, namun penundaan pembayaran terus berlanjut. Tuan A dan Tuan B terlibat perselisihan atas hilangnya uang tunai dan modal sebesar Rp 500 juta. Mereka meminta klarifikasi dari TP, yang tidak ada hubungannya dengan bisnis mereka. RTP mengirimkan dua cek kepada Tuan A, tetapi setelah dicairkan, mereka menemukan bahwa itu adalah cek kosong. Pak A membuat laporan polisi ke Polres Kabupaten Z pada tanggal 7 Desember 2022 dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Penyidik kemudian mengarahkan kasus tersebut untuk diperiksa pada 14 Desember 2022.

Pada 21 Desember, penyidikan sempat tertunda karena tidak adanya Bareskrim. Penyidik ​​meminta biaya yang dipercepat dan meminta biaya yang dipercepat kepada Kasat. Kasus tersebut kemudian diajukan, dan Tuan A dan Tuan B memberikan informasi tentang laporan penyelidikan. Kasubdit menyampaikan agenda perkara tersebut, antara lain pemanggilan saksi ahli, surat panggilan, serta upaya penetapan tersangka dan penahanan. Pelapor menyampaikan surat tanggapan menolak Konfrontir, namun panggilan tersebut tidak dikabulkan karena kurangnya tanggapan dari Pengadilan Negeri Garut. Perundingan dilakukan dengan Tuan A dan Tuan B, dan perundingan terus berlanjut. Pada tanggal 14 Februari, Tuan A membuat pernyataan tertulis yang meminta maaf atas pencemaran nama baik tersebut, menyatakan bahwa surat yang dibagikan pada tanggal 7 Desember adalah palsu dan menyatakan bahwa ia akan mengambil tanggung jawab pidana dan perdata jika terjadi insiden di masa depan. Empat bulan kemudian, pencemaran nama baik itu diulangi oleh direksi PT yang baru, dan berkasnya diserahkan ke PT pada 26 September. Namun, tujuh bulan telah berlalu sejak laporan polisi diterbitkan, dan Pak A belum mendapatkan kejelasan terkait kasus tersebut.

**Pembahasan**

Pada tahun 2022, mediasi di Pengadilan Negeri Garut menghasilkan permintaan maaf dan publikasi kasus pencemaran nama baik oleh Tuan A dan Tuan B, serta permintaan maaf Tuan C dan manajemen PT lainnya atas pencemaran nama baik. Namun Pak A belum mendapatkan kejelasan atas kasus tersebut karena terduga pelaku melarikan diri ke luar Pulau Bangka. Mediasi Notaris memegang peranan penting dalam mediasi sengketa hukum perdata, memperlancar komunikasi, menyampaikan informasi dengan jelas, menggunakan bahasa yang tegas dan bersahabat, mendorong kepatuhan terhadap perjanjian, dan menjaga netralitas. Notaris mempunyai peran yang unik di Indonesia, karena mereka adalah pejabat publik terpercaya yang dapat memfasilitasi dialog konstruktif dan memfasilitasi perjanjian yang saling menguntungkan.

Komunikasi persuasif seorang notaris memerlukan pendekatan yang bijaksana, kemampuan komunikasi yang efektif, dan pengetahuan hukum yang mendalam. Mereka harus menjaga keseimbangan, menjaga keseimbangan, dan menggunakan teknik persuasif untuk mempengaruhi pihak-pihak agar mencapai kesepakatan. Mereka juga harus membangun kepercayaan dengan memastikan kerahasiaan, memperlakukan semua pihak secara adil, dan menunjukkan integritas dalam setiap langkah penyelesaian perselisihan. Berdasarkan hal ini notaris dapat menjadi mediator yang efektif dalam menyelesaikan sengketa hukum perdata secara persuasif dan damai dengan memadukan pendekatan yang bijaksana, kemampuan komunikasi yang efektif, dan pengetahuan hukum yang mendalam.

Notaris memainkan peran penting dalam mediasi hukum perdata, memfasilitasi komunikasi dan negosiasi perjanjian yang saling menguntungkan. Mereka juga dapat memberikan nasihat hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dan memperjelas hak dan kewajiban mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap klien terhadap Notaris antara lain adalah proses hukum yang berlarut-larut, keterlibatan penyidik dan pihak penegak hukum, sulitnya mencapai kesepakatan, keterlibatan media dan publikasi, pengulangan kasus, dan kemajuan dalam penyelesaian sengketa. Pada awalnya, klien mungkin mengharapkan Notaris untuk menyelesaikan perselisihan dengan cepat dan efektif. Namun, ketika proses mediasi mengalami hambatan dan penundaan, klien mungkin menjadi lebih skeptis terhadap kemampuan Notaris dalam menyelesaikan perselisihan. Namun, ketika mediasi berhasil pada bulan Februari 2023, dengan adanya permintaan maaf tertulis dan dipublikasikan di media lokal, klien dapat memperoleh kembali kepercayaan terhadap peran Notaris sebagai mediator. Dari hasil uraian berikut maka dapat di simpulkan sikap klien terhadap Notaris dalam mediasi hukum perdata dapat berubah berdasarkan faktor-faktor seperti berlarut-larutnya proses hukum, keterlibatan penyidik dan penegak hukum, sulitnya mencapai kesepakatan, keterlibatan media dan publikasi, pengulangan kasus, dan kemajuan dalam penyelesaian sengketa.

1. **KESIMPULAN**

Proses mediasi sengketa hukum perdata melibatkan peran Notaris sebagai mediator yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kendala dalam proses hukum, keterlibatan pihak berwenang, kesulitan mencapai kesepakatan, publikasi di media, pengulangan kasus, dan kemajuan dalam penyelesaian sengketa. Perubahan sikap klien terhadap Notaris dapat terjadi sepanjang proses mediasi berlangsung, mulai dari harapan tinggi hingga keraguan, tergantung pada berbagai faktor tersebut. Meskipun demikian, hasil mediasi yang positif dapat memperkuat kepercayaan klien terhadap Notaris sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa hukum perdata.

Notaris berperan penting dalam mediasi, memfasilitasi perjanjian perdamaian dan melibatkan berbagai tahapan interaksi dengan pihak-pihak terkait. Mereka juga berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi. Akta otentik yang dibuat oleh notaris berfungsi sebagai bukti sah terjadinya perjanjian, mencatat perjanjian damai, dan memuat permintaan maaf secara tertulis. Namun, Notaris yang kurang memiliki pendidikan hukum yang memadai pada saat proses pembuatan akta dapat menghadapi pembatalan, tuntutan perdata, sanksi administratif, dan tanggung jawab disipliner. Sebagai mediator yang netral, notaris memfasilitasi komunikasi, membantu mencapai kesepakatan, dan mencatatnya dalam akta otentik untuk menjamin keabsahannya. Perlindungan hukum terhadap profesi Notaris memerlukan peningkatan standar profesionalisme, penegakan hukum yang kuat, dan perlindungan yang lebih jelas untuk menjaga integritas dan independensi. Notaris seringkali menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman, tekanan politik, intimidasi, lambatnya penegakan hukum, dan konflik kepentingan. Dinamika proses mediasi mempengaruhi persepsi klien terhadap peran Notaris dalam menyelesaikan sengketa hukum, mulai dari harapan awal hingga skeptisisme, kembalinya kepercayaan, dan kesiapan menghadapi situasi serupa di kemudian hari.

1. **SARAN**
2. Meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sikap klien terhadap Notaris selama proses mediasi, seperti faktor psikologis, pengalaman sebelumnya, atau faktor eksternal lainnya.
3. Melakukan studi komparatif antara kasus-kasus mediasi yang sukses dan yang tidak sukses untuk mengidentifikasi pola-pola yang berbeda dalam komunikasi dan penyelesaian sengketa.
4. Melakukan penelitian lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap profesi notaris, termasuk analisis terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi oleh notaris dalam menjalankan tugasnya serta identifikasi solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum mereka.
5. Menginvestigasi lebih lanjut tentang peran dan pengaruh pihak berwenang, termasuk polisi dan penyidik, dalam proses mediasi sengketa hukum perdata.
6. Melakukan studi longitudinal untuk melacak perubahan dalam persepsi klien terhadap Notaris seiring waktu dan melihat dampaknya terhadap hasil mediasi dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris secara keseluruhan.
7. **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmadi Miru, 2011, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 133

Abdulkadir, Muhammad. Hukum Perikatan. Bandung: Alumni, 1982

Abdurrachman, Dasar-Dasar Public Relation (Bandung: Cirtra Aditya Bakti, 1993)., 75.

Arliman S, Laurensius. Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Arto, Mukti. Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Bambang D Prasetyo (2020) Strategi Branding Teori dan Perspektif Komunikasi Dalam Bisnis Universitas Brawijaya press.

Cangara, H. (1998). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Cangara Hafied, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, Dan Strategi (Jakarta: Raja Grafindo, 2009),. 38.

Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)., 6.

Dr. Arie Cahyono, S. (2019). Menciptakan sebuah kekuatan komunikasi efektif, Unggul Berkomunikasi. Jawa timur: Uwais Inspirasi Indonesia.

Dr. Edi Harapan, M. &. (2014). Komunikasi Antarpribadi: Prilaku insani dalam organisasi pendidikan. Jakarta: PT. Raka Grafindo Persada.

Enndah Puspita Sari, (2022) Penyelesaian Sengketa Kenotariatan Melalui Upaya Mediasi oleh Notaris. https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.89Article Details Issue: Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Multidisiplin Indonesia https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/89

Freedman & Michael L. Prigoff, Confidentiality in Mediation: The Need For Protection, Ohio St.J. On Dispute Resolution, 1986. Linda R. Sanger, Settling Disputes Conflict Resolution in Business, Mediasi, Pusat Pengakajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Perpustakaan Nasional RI, 2003. Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta : Fikahati Aneska dan BANI, 2002.

Fariya Zahira Rahman & Ali Muhammad (2023) Strategi Komunikasi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Anak Tindak Pidana Susila (Studi Kasus : Bapas Kelas I Jakarta Pusat) DOI: https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5542 https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5542

Hadiputra, Geivindra Gilang Rahmandya, and Deddy Muharman. "Implementasi Komunikasi Persuasif Menjadi Barista." Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia 4.1 (2021): 11-16.

Hakki, A. S. (2017). Pengantar Ilmu komunikasi. Yogyakarta: Deepublish. Hardjana, A. (2000). Audit Komunikasi Teori Dan Praktek. Jakarta: PT. Grasindo.

Habib Adije, 2008, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 14.

Hedy Faizal (2024) Kedudukan Notaris sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kenotariatan e-ISSN :2985-7716, p-ISSN :2985-6345, Hal 307-317DOI: https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1659 https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JUPENDIS/article/view/1659/1529

Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3371/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Hapusnya Perikatan. Ed. 1. Cet 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

M.Hikmat, D. (2011). Metode Penelitian, Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mulyana, D. (2005). Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ngalimun, S. (2021). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Nofrion, S. (2016). Komunikasi Pendidikan, Penerapan Teori dan Konsep Komunikasi Dalam Pembelajaran. Jakarta: Kencana.

Prof. Dr. Hafield Cangara, M. (2006). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Prof.Drs.H.A.W. Widjaja. (1988). Ilmu Komunikasi Pengantar Studi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Suryanto, S. (2017). Pengantar Ilmu Komunikasi. Bandung: CV. Pustaka T. Wood, J. (2014 :20). Komunikasi

Zikri Fachrul Nurhadi dan Achmad Wildan Kurniawan, “Kajian Tentang Efektivitas Pesan Dalam Komunikasi,” Jurnal Komunikasi 3, no. 1 (2017): 91 https://journal.uniga.ac.id/index.php/JK/.)

Syaiful Rohim, Teori Komunikasi Perspektif, Ragam, Dan Aplikasi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016)., 9

Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)., 21.

Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)., 55.

Herdiyan Maulana & Gumgum Gumelar, Psikologi Komunikasi Dan Persuasi (Jakarta: Akademia Permata, 2013),

Herdiyan Maulana & Gumgum Gumelar, Psikologi Komunikasi Dan Persuasi (Jakarta: Akademia Permata, 2013),. 26.

Najmia Fathia et al., 2022 “MODEL KOMUNIKASI PERSUASIF KELUARGA ANTARA KESADARAN KESEHATAN DI ERA NEW NORMAL DI,” n.d.

Jufrizal, “Komunikasi Persuasif Antara Guru Dan Siswa (Studi Di MAN 1 Pidie Jaya),” Tabayyun 02 (2021): 8

Ranggapandu Cindarputera & , Mohamad Fajri Mekka Putra (2022) Kewenangan Notaris Dalam Persoalan Penyuluhan Hukum Dan Mediasi

Wika Yudha Shanty (2023) Eksistensi Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi DOI: https://doi.org/10.26905/blj.v4i1.10582 https://ojs3.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/10582

Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. Jurnal Wawasan Yuridika, 3(2), 177. https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.224

Sulistianingsih D & Fibriani I, (2023) Problematik Akta Perdamaian Pada Penyelesaian Sengketa Keperdataan Melalui Mediasi P-ISSN: 2656-534X, E-ISSN: 2656-5358 Jurnal Suara Hukum https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/17061

Rio Rolando, Santy Fitnawati Wn, Dwi Juniyanto & Nahes Setiawan (2024) Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2, No.1 Maret 2024 e-ISSN: 2988-5213; p-ISSN: 2988-7747, Hal 319-327 DOI: https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1682